

PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2019-2021

Sarsiti
Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta
sitiunsa76@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of ownership structure, the composition of the board of commissioners, for financial performance in banking companies listed on the Indonesian Stock Exchange in 2019-2021. This study uses a sample of 38 banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2021 with a total of 114 data collected. The independent variabel in this study is concertrated ownership structure, the composition of the board of commissionares, while the dependent variabel is the financial performance. The data analysis methode used in this study is multiple linier regression to test the effect of the independen variable on the dependent variable. The results of this study indicate that the concertrated ownership structure have a positive and significant effect on financial performance, while the composition of the board of commissioners has a negative and significant effect on financial performance.

Keyword : *concertrated ownership structure, the composition of the board of commissioners, and financial performance.*

PENDAHULUAN

Kinerja dalam kamus istilah akuntansi adalah kuantifikasi dari keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode tertentu. Kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Kinerja keuangan memiliki peranan penting di dalam menentukan kelancaran kegiatan perusahaan.

Analisa laporan keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan, salah satu yang bisa digunakan adalah dengan analisa rasio. Kinerja keuangan perusahaan merupakan hasil dan kondisi dari keuangan perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis, sehingga dapat diketahui bagaimanakah keadaan keuangan perusahaan dalam satu periode yang ditentukan. Penilaian kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat antara lain melalui profitabilitas.

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan memperoleh laba atau keuntungan. Kinerja keuangan perusahaan akan optimal jika perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan. Dengan tata Kelola yang baik menjadikan perusahaan akan lebih optimal dalam pencapaian tujuan perusahaan. Tata Kelola yang baik dapat membentuk pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan professional. Penerapan tata Kelola yang baik akan menentukan kinerja keuangan suatu perusahaan (Like, 2016). Menurut

komite nasional kebijakan *Corporate Governance* (tata Kelola) (2012) bahwa tata Kelola yang baik mengandung lima prinsip yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran, dan diciptakan untuk dapat melindungi kepentingan semua pihak (*stakeholders*).

Dengan tata Kelola yang baik manajer akan membuat keputusan keuangan yang dapat menguntungkan semua pihak (*stakeholder*). Menurut PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 8/4/PBI/2006 yang mengatur bahwa seluruh bank umum di Indonesia harus menerapkan struktur tata Kelola yang baik. Struktur yang dimaksud itu sendiri adalah elemen fungsional yang merupakan alat guna menciptakan keadaan GCG di dalam suatu bank. Indikator GCG antara lain struktur kepemilikan, dewan komisaris independen, dan ukuran dewan komisaris (Hidayat, 2009).

Struktur kepemilikan merupakan faktor yang banyak diteliti sebagai salah satu praktek tata Kelola yang baik. La Porta *et al.* (1999) dalam Tarjo (2008) menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan publik di Indonesia memiliki konsentrasi kepemilikan atau dikendalikan oleh *shareholders* besar. Hasil penelitian berbeda ditunjukkan Hubert dan langhe (2002) dalam Nuryaman (2008) yang mengungkapkan konsentrasi kepemilikan dapat menjadi mekanisme internal pendisiplinan manajemen, sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektifitas monitoring, karena dengan kepemilikan yang besar menjadikan *shareholder* memiliki akses informasi yang cukup signifikan untuk mengimbangi keuntungan informasional yang dimiliki manajemen. Dalam hal ini, struktur kepemilikan terkonsentrasi dapat mengurangi masalah agensi.

Dewan komisaris dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dewan komisaris independen dengan indikator komposisi dewan komisaris dan ukuran dewan komisaris. Keberadaan dewan komisaris independen juga mendapat perhatian dari pemerintah dengan terbitnya Ketentuan Bapepam dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-A tanggal 14 Juli tahun 2004 yang mengharuskan perusahaan untuk memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah dewan komisaris yang ada.

Dewan Komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan *shareholders* (mayoritas) dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya (Muntoro, 2006). Semakin besar komposisi dewan komisaris, maka kemampuan dewan komisaris untuk mengambil keputusan dalam rangka melindungi seluruh *stakeholders* dan mengutamakan perusahaan semakin objektif. Penelitian Agrawal dan Knoeber (1996); Baysinger dan Butler (1985) dalam Rahman dan Ali (2006) menemukan bahwa dengan adanya dewan komisaris independen, pengelolaan perusahaan lebih efektif dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Apabila jumlah komisaris independen semakin besar atau dominan, hal ini dapat memberikan *power* kepada dewan komisaris untuk menekan manajemen supaya meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan (Haniffa dan Cooke, 2002).

Ukuran dewan komisaris yang besar juga dapat mempengaruhi tanggung jawab terhadap pihak eksternal perusahaan. Ketentuan Bapepam dan Peraturan Bursa Efek Indonesia mengatur jumlah dewan komisaris yang harus dimiliki perusahaan minimal 3 (tiga) orang dan maksimal sama dengan jumlah dewan direksi yang dimiliki perusahaan.

Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen. Melalui peran monitoring oleh dewan komisaris, perusahaan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat terjamin kelangsungannya (Sulastini, 2007). Dikaitkan dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan, semakin besar ukuran dewan komisaris, maka komposisi pengalaman dan keahlian yang dimiliki oleh dewan komisaris semakin meningkat, sehingga dapat melakukan aktifitas monitoring dengan lebih baik (Akhtaruddin, *et. al.*, 2009).

Berdasarkan uraian permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian apakah struktur kepemilikan terkonsentrasi, komposisi dewan komisaris independent berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan terkonsentrasi, komposisi dewan komisaris independent terhadap kinerja keuangan pada perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.

TINJAUAN PUSTAKA

Good Corporate Governance (GCG) (tata kelola perusahaan yang baik)

Tata kelola perusahaan atau istilah “*corporate governance*” berasal dari suatu analogi antara pemerintahan suatu negara atau kota dengan pemerintahan dalam suatu perusahaan (Becht *et al.*, 2002 dalam Solihin 2008:115). Tata Kelola juga berkaitan dengan penyelarasan masalah tindakan kolektif yang melibatkan berbagai investor dan juga menyangkut rekonsiliasi berbagai kepentingan yang berbeda-beda dari *shareholders*. Hal tersebut berarti bahwa tanpa adanya tata Kelola yang baik, maka akan terjadi konflik kepentingan yang bisa memberi dampak buruk bagi kinerja perusahaan

Mekanisme tata kelola juga dapat membawa beberapa manfaat, antara lain:

- a. Mengurangi *agency cost* yang merupakan biaya yang harus ditanggung *shareholder* karena penyalahgunaan wewenang sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
- b. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*) sebagai dampak dari menurunnya tingkat bunga atas dana dan sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.
- c. Menciptakan dukungan para *stakeholder* dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP- 117/M-MBU/2002, CG adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai *shareholder* dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Mengingat GCG merupakan konsep tata pengelolaan perusahaan dengan sebaik-baiknya, tentu saja dalam pengelolaan tersebut terkait beberapa prinsip yang harus dipahami. Menurut *Organization For Economic Co-operation and Development (OECD)* berkaitan dengan GCG ini mencakup 4 bidang utama yaitu:

- a. Hak para *shareholder* dan sekaligus perlindungannya.
- b. Peran karyawan dan pihak-pihak *stakeholder* lainnya.
- c. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparan sehubungan dengan struktur dan operasi perusahaan.
- d. Tanggung jawab dewan komisaris maupun direksi terhadap perusahaan, *shareholder*, dan *stakeholder* lainnya.

Di Negara Indonesia, *Code Of Good Corporate Governance* yang diterbitkan oleh Komite Nasional *Corporate Governance* terdapat 5 prinsip yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan, yaitu:

a. *Transparancy* (Transparansi)

Untuk mewujudkan dan mempertahankan objektivitas dalam praktek bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dan material yang mudah diakses dan mudah dipahami bagi *stakeholder*. Perusahaan harus mempunyai inisiatif untuk mengungkapkan informasi tidak hanya yang diwajibkan oleh hukum dan regulasi, tetapi juga informasi lain yang dianggap penting bagi *shareholder*, kreditur dan *stakeholder* lain untuk pembuatan keputusan.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan wajar dan transparan. Jadi, perusahaan harus mengatur cara agar kepentingan perusahaan sejalan dengan kepentingan *shareholder* dan *stakeholder* lain. Akuntabilitas adalah salah satu prasyarat untuk memperoleh kinerja berkelanjutan.

c. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Perusahaan harus mematuhi hukum dan aturan dan memenuhi tanggung jawab kepada komunitas dan lingkungan dengan tujuan mempertahankan kelangsungan bisnis jangka panjang dan dikenal sebagai perusahaan yang baik.

d. *Independensi* (Kemandirian)

Untuk mendukung implementasi prinsip-prinsip GCG, perusahaan harus diatur secara independen oleh kekuasaan yang seimbang, dimana tidak ada salah satu organ perusahaan yang mendominasi organ lain dan tidak ada intervensi dari pihak lain.

e. *Fairness* (Kewajaran)

Dalam melakukan aktifitasnya, perusahaan harus mengutamakan kepentingan *shareholder* dan *stakeholder* lainnya berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan. Berbagai uraian mengenai prinsip-prinsip GCG menurut beberapa sumber tersebut, terlihat sekali bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya suatu perusahaan tidak hanya mengedepankan bagaimana maksud dan tujuan perusahaan itu dapat direalisasikan. Namun dibalik itu semua ada etika dan norma yang harus diperhatikan, sehingga dewan komisaris dan direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tetap mengutamakan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan, baik *shareholders* maupun *stakeholders*.

Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan merupakan jenis institusi atau perusahaan yang memegang saham terbesar dalam suatu perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Struktur kepemilikan dapat berupa investor individual, pemerintah, dan institusi swasta. Struktur

kepemilikan terbagi dalam beberapa kategori. Secara spesifik kategori struktur kepemilikan meliputi kepemilikan oleh institusi domestik, institusi asing, pemerintah, karyawan dan individual domestik. Struktur kepemilikan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya.

Struktur kepemilikan saham mencerminkan distribusi kekuasaan dan pengaruh di antara *shareholder* atas kegiatan operasional perusahaan. Salah satu karakteristik struktur kepemilikan adalah struktur kepemilikan yang terbagi dalam dua bentuk struktur kepemilikan: kepemilikan terkonsentrasi, dan kepemilikan menyebar. Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga *shareholder* tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan dengan yang lainnya. Kepemilikan saham dikatakan menyebar, jika kepemilikan saham menyebar secara relatif merata ke publik, tidak ada yang memiliki saham dalam jumlah sangat besar dibandingkan dengan lainnya (Dallas dalam Nuryaman, 2008).

Struktur kepemilikan terkonsentrasi dapat menjadi mekanisme internal pendisiplinan manajemen, sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektifitas monitoring, karena dengan kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang cukup signifikan untuk mengimbangi keuntungan informasi yang dimiliki manajemen.

Negara-negara dengan rendahnya perlindungan terhadap investor seperti halnya Indonesia, *shareholder* merasa khawatir akan kemungkinan berbedanya pendapatan yang diperoleh dengan yang diekspektasikan. Akibatnya, mereka memperbesar persentase kepemilikan atas perusahaan sebagai salah satu cara untuk melindungi diri. Para pemegang saham dapat mengendalikan perusahaan melalui *voting power* atau representasi mereka di manajemen sehingga hak-hak mereka terlindungi (La Porta dan Silanez, 1999 dalam Nuryaman, 2008).

Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Jumlah komissais independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, dan juga untuk menjaga “*fairness*” serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan *shareholder* mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan *shareholder* minoritas, bahkan kepentingan para *stakeholders* lainnya sekaligus “*the interest of the whole company*”. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsinya, komisaris independen sangat membutuhkan informasi yang akurat dan berkualitas untuk memonitoring jalannya operasi perusahaan (Rahmawati, 2010).

Keberadaan komisaris independen telah diatur BEI melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan bahwa perusahaan yang *listed* di bursa harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki *shareholder minoritas*. Dalam peraturan ini persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

Beberapa kriteria lainnya tentang komisaris independen adalah sebagai berikut:

- 1) Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan *shareholder* mayoritas perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- 2) Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- 3) Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- 4) Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 5) Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh *shareholder* minoritas yang bukan *shareholder* pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Anggota dewan komisaris diangkat melalui RUPS. Ini dapat ditemukan di negara-negara seperti Indonesia, Belanda, Denmark, Jerman dan Jepang. Di sini yang dimaksud afiliasi yaitu seperti berikut ini:

- 1) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal.
- 2) Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut.
- 3) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama.
- 4) Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut.
- 5) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.
- 6) Hubungan antara perusahaan dan *shareholder* utama.

Menurut Beassly (2001) dalam Sembiring (2003) ada 3 karakteristik penting dewan komisaris yang mendukung aktifitas manajemen. Karakteristik tersebut antara lain: (1) komposisi dewan komisaris, (2) pemisahan antara pimpinan dewan komisaris dengan *chief executive officer (CEO)*, dan (3) ukuran dewan komisaris. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah komposisi dewan komisaris.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode tertentu yang mengacu terhadap standar yang telah ditetapkan (Zarkasyi 2008). Evaluasi tingkat kinerja perusahaan dilakukan melalui pengukuran atas apa yang dihasilkan perusahaan menggunakan ukuran-ukuran yang telah disepakati. Hasil peneliainnya kinerja ini akan membrikan informasi yang berguna untuk perusahaan, investor, pemerintah, dan pihak yang berkepentingan. Ukuran kinerja dapat

dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengukuran non kinerja keuangan dan pengukuran kinerja keuangan.

Pengukuran kinerja non keuangan menggunakan aspek operasional dan administrasi perusahaan sebagai bahan pengukurannya, sedangkan pengukuran kinerja keuangan menggunakan analisis keuangan yang pada dasarnya dilakukan dengan melakukan evaluasi kinerja di masa lalu (Lesmana dan Surjanto 2003). Pengukuran kinerja keuangan dilakukan dengan melihat laporan keuangan perusahaan. Salah satu metode yang sering digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah melalui analisis rasio keuangan. Rasio keuangan menggambarkan hubungan antara jumlah tertentu dengan jumlah lainnya pada laporan keuangan. Setiap bentuk analisis rasio memiliki tujuan tertentu yang digunakan untuk menentukan perbedaan penekanan hubungan (Brigham dan Houston 2001), beberapa rasio keuangan diantaranya rasio likuiditas, rasio leverage, rasio profitabilitas, rasio aktivitas dan rasio pasar.

Penelitian Terdahulu

Tata Kelola Perusahaan (*corporate governance*) berasal dari kata “*governance*” berasal dari bahasa Prancis yaitu “*gubernance*” yang memiliki arti pengendalian. Dari kata tersebut muncul suatu istilah *corporate governance* yang dipergunakan dalam konteks perusahaan atau organisasi. Terminologi *corporate governance* memiliki pengertian dasar yaitu suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan (Sutojo dan Aldridge 2008). Dalam konteks Indonesia, *corporate governance* dikenal dengan istilah tata kelola perusahaan. Muncul berbagai pengertian tata kelola perusahaan yang diungkapkan para ahli maupun organisasi yang fokus terhadap tata kelola perusahaan dari pengertian dasar tersebut.

Pengertian tata kelola perusahaan yang sering dikutip para peneliti dan penulis yaitu pengertian dari Cadbury (1992) yang menyatakan tata kelola perusahaan sebagai suatu sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan oleh dewan direksi sebagai suatu tanggung jawab yang diberikan para pemegang saham dengan tujuan memuaskan kepentingan pemegang saham. Teori tata kelola perusahaan muncul sebagai jawaban atas permasalahan keagenan di antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (perusahaan/dewan direksi/manajer) yang mempunyai kepentingan berbeda. Namun ternyata konflik yang dihadapi perusahaan semakin melebar. Konflik perusahaan tidak hanya berhenti di lingkup internal perusahaan, pihak eksternal berpotensi menimbulkan konflik. Pihak eksternal tersebut dikenal dengan istilah pemangku kepentingan (*stakeholder*). Berdasarkan kondisi tersebut, perspektif tata kelola perusahaan semakin meluas yang berlandaskan pada *stakeholder theory*.

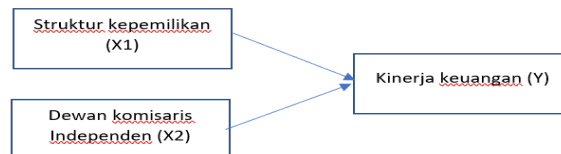
Cadbury pun merevisi pengertian tata kelola perusahaan menjadi suatu prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para pemegang saham khususnya dan *stakeholder* pada umumnya (Cadbury dalam Dewi dan Widagdo 2012). *Forum for Corporate Governance in Indonesia*, suatu lembaga yang bertujuan meningkatkan dan mensosialisasikan tata kelola perusahaan pada komunitas bisnis di Indonesia, mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai seperangkat aturan

pengarahan dan pengendalian yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, manajer, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya (FCGI 2013). Dari beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tata kelola perusahaan bekerja dengan cara mendefinisikan hak dan kewajiban setiap partisipan, kemudian diadakan pengendalian agar partisipan bekerja sesuai porsinya sehingga tujuan akhir dapat tercapai yang akan menguntungkan setiap partisipan yang terlibat.

Tujuan dan Manfaat Tata Kelola Perusahaan Menurut Sutojo dan Aldridge (2008), penerapan tata kelola perusahaan mempunyai lima tujuan utama, yaitu: a) Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham. b) Melindungi hak dan kepentingan stakeholder non pemegang saham. c) Meningkatkan nilai perusahaan dan pemegang saham. d) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau board of director dan manajemen perusahaan. e) Meningkatkan mutu hubungan board of director dengan manajemen senior perusahaan. Berdasarkan hasil studi empiris yang dilakukan para peneliti telah ditemukan buktibukti bahwa tata kelola perusahaan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan. Melalui kontribusi positif tersebut dapat tercapailah tujuan perusahaan di dalam menerapkan tata kelola perusahaan. Beberapa hasil studi tersebut adalah sebagai berikut: a) Penelitian Brown and Caylor (2004) ditemukan bahwa perusahaan dengan *good corporate governance* menghasilkan laba yang lebih tinggi, memiliki risiko bisnis yang lebih rendah, dan menuai return saham yang lebih tinggi jika dibandingkan perusahaan dengan *bad corporate governance*. b) Studi empiris yang dilakukan di Jerman menunjukkan bahwa perusahaan dengan *good corporate governance* lebih mampu meningkatkan *market-to-book* ratio-nya yang berarti perusahaan dapat meningkatkan kapitalisasi pasarnya (Drobetz et al. 2003). c) Penelitian Coombes and Watson (2000) menyimpulkan bahwa investasi dipertimbangkan lebih aman dan terlindungi jika dilakukan pada perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan yang ada dalam penelitian ini dan kajian terhadap penelitian terdahulu maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Diduga struktur kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di BEI tahun 2019-2021.

2. Diduga komposisi dewan komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di BEI tahun 2019-2021.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 48 perusahaan Perbankan umum *go public* yang *listed* di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021. Dari populasi yang telah ada akan diambil beberapa dengan jumlah tertentu sebagai sampel. Nama-nama perusahaan Perbankan yang akan digunakan didapatkan dari website www.idx.co.id. Teknik sampel yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode *purposive sampling*, yaitu data yang ditarik menggunakan pertimbangan.

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan terdiri dari:

1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen (Husein Umar, 2011: 48). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan. Penelitian ini lebih mengacu pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian diukur menggunakan rasio keuangan profitabilitas yaitu *Return on Assets* (ROA). *Return on Assets* merupakan salah satu rasio profitabilitas yang mampu menunjukkan berapa banyak laba bersih setelah pajak yang dapat dihasilkan dari total aset atau kekayaan yang dimiliki perusahaan (Brigham dan Houston, 2013: 148 dalam Kartikasari Y.D., 2016: 64). Semakin besar ROA suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang diperoleh. Secara matematis, ROA diformulasikan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2. Variabel Independen

a. Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi

Struktur kepemilikan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi kepemilikan terkonsentrasi dan menyebar. Kepemilikan terkonsentrasi diproksi dengan jumlah kepemilikan dalam suatu perusahaan terkonsentrasi >50% dimiliki oleh individu/keluarga. Sedangkan kepemilikan menyebar diproksi dengan jumlah kepemilikan saham individu/keluarga yang memiliki saham ≤ 50% dari total saham perusahaan. Klasifikasi tersebut sesuai dengan yang digunakan oleh Veronica dan Utama (2005). Setelah itu dibuat variabel *dummy*, yaitu 1 untuk Struktur kepemilikan terkonsentrasi, dan 0 untuk sebaliknya.

b. Komposisi Dewan Komisaris Independen

Komposisi Dewan Komisaris Independen adalah susunan keanggotaan yang terdiri dari komisaris dari luar perusahaan (komisaris independen) dan komisaris dari dalam perusahaan. Cara pengukuran komposisi dewan komisaris independent yaitu:

$$\text{Komposisi Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Komisaris}}$$

Komposisi dewan komisaris penelitian ini konsisten dengan Nuryaman (2008).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi yang dijelaskan oleh Ghozali (2011), menyatakan bahwa analisis regresi digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Pada penelitian ini akan menggunakan metode analisis berganda. Sarjono dan Julianita (2013), menyatakan bahwa analisis regresi berganda merupakan pengukuran pengaruh yang melibatkan dua atau lebih variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3 , dan seterusnya) dengan satu variabel terikat (Y) yang dirumuskan sebagai berikut ini.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \varepsilon$$

Variabel Y merupakan variabel terikat (dependen) dan X merupakan variabel-variabel bebas (independen). Sedangkan a merupakan konstanta dan b merupakan koefisien regresi disetiap variabel bebas. Dimana dalam pengaplikasiannya pengaruh antara struktur kepemilikan terkonsentrasi (X_1), komposisi dewan komisaris (X_2) terhadap kinerja keuangan (Y) menghasilkan persamaan diatas.

a. Uji Parsial (uji statistik t)

Pengujian ini digunakan untuk melihat signifikansi masing-masing koefisien regresi. Ghozali (2011), menyatakan bahwa uji statistik t pada dasarnya menunjukkan pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Ketentuan dalam uji statistik t yaitu dengan membandingkan nilai signifikansi t dengan derajat kepercayaan yang menggunakan 5% (0,05). Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga dapat diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2).

Analisis koefisien determinasi yang didefinisikan oleh Ghozali (2011), menjelaskan bahwa tujuan dilakukannya uji koefisien determinasi (R^2) yaitu untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen dengan nilai antara nol dan satu. jika nilai $R^2 = 0$, berarti variabel independen tidak mempunyai kemampuan dalam menjelaskan variasi variabel dependen serta nilai $R^2=1$, mengindikasikan bahwa variabel independen mempunyai kemampuan dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

c. Uji Simultan (uji statistik F).

Uji statistik F yang diungkapkan oleh Ghozali (2011), menyatakan bahwa uji statistik F merupakan suatu pengujian yang pada dasarnya digunakan untuk melihat apakah semua variabel independen yang dimasukkan kedalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang akan diuji yaitu parameter dalam model apakah sama dengan nol. Ketentuan untuk melakukan uji statistik F yaitu jika nilai $F > 4$, maka H_0 bisa ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, dimana menyatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Analisis Deskriptif

Hasil analisis deskriptif terhadap masing-masing variabel untuk perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Tahun 2019-2021 dalam penelitian ini secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.

Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
ROA	114	0,60	0,94	0,6385	0,07928
Struktur kepemilikan	114	0,37	1,00	0,5768	0,09340
Dewan Komisaris independen	114	2	9	4,85	1,915
Valid N (listwise)	114				

Sumber: Print Out SPSS, Diolah Maret 2022.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui hasil uji deskriptif masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kinerja Keuangan (ROA)

Hasil uji statistik deskriptif pada tabel IV.1. dapat dilihat, bahwa jumlah 38 perusahaan perbankan dengan periode penelitian 2019-2021, maka data yang digunakan dalam penelitian sebanyak 114 data. Kinerja keuangan dalam penelitian ini dilihat dari hasil perhitungan ROA yang mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,6385 dan standar deviasi sebesar 0,07928. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*), hal ini berarti kinerja keuangan perbankan yang dijadikan sampel penelitian tidak memiliki kesenjangan yang besar antara nilai terendah dan nilai tertinggi selama periode penelitian.

b. Struktur kepemilikan terkonsentrasi

Hasil uji statistik deskriptif struktur kepemilikan terkonsentrasi dalam penelitian ini yang dilihat dari jumlah kepemilikan sahan keluarga/individu dalam perusahaan dimana perusahaan yang mempunyai jumlah kepemilikan 50% ke atas termasuk dalam kategori struktur kepemilikan terkonsentrasi dan jumlah kepemilikan sahan keluarga/individu yang kurang dari 50% termasuk dalam kategori kepemilikan yang tidak terkonsentrasi. Dalam penelitian ini terdapat sebanyak 82 data atau sebesar 71,9% termasuk dalam kategori tidak terkonsentrasi dan terdapat sebanyak 32 data atau 28,1% termasuk dalam kategori terkonsentrasi.

c. Komposisi Dewan Komisaris independen

Hasil uji statistik deskriptif pada tabel IV.1. dapat dilihat, bahwa dari data dalam penelitian sebanyak 114 data komposisi dewan komisaris independent mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,5768 dan standar deviasi sebesar 0,09340. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*), hal ini berarti komposisi dewan komisaris independent yang dijadikan sampel penelitian tidak memiliki kesenjangan yang besar antara nilai terendah dan nilai tertinggi selama periode penelitian.

2. Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 2
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients	t	Sig.
(Constant)	5,331	12,015	-,000
Struktur kepemilikan terkonsentrasi	0,337	2,537	0,010
Komposisi Dewan Komisaris independent	-1,556	-2,600	0,011
F hitung = 12,160			0,000
Adj R Square = 0,250			

Dependent Variabel: ROA

Sumber : Hasil Olah Data, Maret 2022.

Dari hasil uji regresi linier dengan bantuan program *SPSS versi 23* diperoleh :

$$a = 5,331$$

$$b_1 = 0,337$$

$$b_2 = -1,556$$

Sehingga diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 5,331 + 0,337X_1 - 1,556X_2 + \epsilon$$

Artinya:

Koefisien regresi untuk struktur kepemilikan terkonsentrasi (X_1) sebesar 0,337 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan kepemilikan saham terkonsentrasi dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka perubahan kinerja keuangan yang terjadi adalah sebesar 0,337% dengan arah yang sama. Adapun hasil uji hipotesis secara parsial pengaruh kepemilikan saham terkonsentrasi terhadap kinerja keuangan diketahui bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,537 > 1,984$ dengan *p-value* lebih kecil dari 0,05 yaitu ($0,010 < 0,05$), berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya struktur kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.

Koefisien regresi untuk komposisi dewan komisaris independen (X_2) sebesar -1,556 dan bertanda negatif. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan komposisi dewan komisaris independent dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka perubahan kinerja keuangan yang terjadi adalah sebesar -1,556% dengan arah yang berbeda. Adapun hasil

uji hipotesis secara parsial pengaruh komposisi dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR diketahui bahwa nilai $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ yaitu $-2,600 < -1,984$ dengan $p-value$ lebih kecil dari 0,05 yaitu ($0,011 < 0,05$), berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya komposisi dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan dengan uji F Test yang terdiri dari struktur kepemilikan terkonsentrasi, komposisi dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021, dapat diketahui bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($12,160 > 2,70$) dan $p-value$ lebih besar dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), berarti H_a diterima dan H_0 ditolak, berarti struktur kepemilikan terkonsentrasi, komposisi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.

Berdasarkan hasil print out tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R Square* (R^2) dalam penelitian ini sebesar 0,250. Sehingga dapat diartikan bahwa variasi variabel independen struktur kepemilikan terkonsentrasi, komposisi dewan komisaris independen pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021 sebesar 25% sedangkan sisanya sebesar 75% dipengaruhi oleh faktor yang lainnya. Sehingga dapat diketahui bahwa pemilihan variabel-variabel yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan sudah sesuai, mengingat nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini relatif kecil, sehingga masih terdapat banyak variabel lain yang dapat digunakan untuk memprediksi kinerja keuangan.

Pembahasan

Hasil dari hipotesis pertama yang diuji dengan menggunakan uji t, menunjukkan bahwa variabel struktur kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang ada pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021. Variabel komposisi dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang ada pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R Square* (R^2) dalam penelitian ini sebesar 0,250. Sehingga dapat diartikan bahwa variasi variabel independen struktur kepemilikan terkonsentrasi, komposisi dewan komisaris independen pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021 sebesar 25% sedangkan sisanya sebesar 75% dipengaruhi oleh faktor yang lainnya. Sehingga dapat diketahui bahwa pemilihan variabel-variabel yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan sudah sesuai, mengingat nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini relatif kecil, sehingga masih terdapat banyak variabel lain yang dapat digunakan untuk memprediksi kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan dapat diketahui bahwa variabel struktur kepemilikan terkonsentrasi, komposisi dewan komisaris independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel struktur kepemilikan terkonsentrasi, komposisi dewan

komisaris independent merupakan variabel yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021.

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa struktur kepemilikan terkonsentrasi dalam penelitian ini secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang ada pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi terkonsentrasi kepemilikan saham perusahaan terdapat kecenderungan dapat meningkatkan kinerja keuangan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Shofwatun Nida (2015) dan Fery Ferial, Suhadak dan Siti Ragil Handayani (2016) yang menerangkan bahwa struktur kepemilikan saham mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa komposisi dewan komisaris dalam penelitian ini secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris independent berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Salsabila Sarafina Muhammad Saifi (2017) dan Yohannita Dwi Kartikasari (2016) yang menerangkan bahwa komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa struktur kepemilikan dan komposisi dewan komisaris independent berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan. Tata Kelola Perusahaan mewajibkan perusahaan untuk menginformasikan kepada pemegang saham mengenai kegiatan dan kondisi secara real sehingga pemegang saham dapat mengambil keputusan secara akurat. Mihaela (2009) dalam Caesari (2015) menekankan bahwa perusahaan menerapkan budaya transparansi dan model efektif dari Tata Kelola Perusahaan akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Pada penelitian ini, Tata Kelola Perusahaan hanya memperhitungkan untuk komposisi dewan komisaris independent tidak memperhitungkan penilaian kualitatif komisaris independent yang mempertimbangkan aspek dari setiap individu komisaris independen, seperti latar belakang, kemampuan, kompetensi, pengalaman, profesionalisme, integritas, dan indikator kualitatif lainnya. Penerapan Tata Kelola Perusahaan harus disesuaikan dengan karakteristik perusahaan dan model penerapan Tata Kelola Perusahaan pada satu perusahaan belum tentu akan mengakibatkan imbas yang sama dengan perusahaan lainnya. Setiap perusahaan memiliki model penerapan Tata Kelola Perusahaan yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta :Rineka Cipta.

- Caesari, Annisa Putri. 2015. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Indeks KOMPAS100. [tesis] Institut Pertanian Bogor. Bogor (ID).
- Ferial, dkk. 2016. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dan Efeknya Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014)". *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* | Vol. 33 No. 1 April 2016 Hal: 147 – 150.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jusup, Haryono. 2001. *Dasar-dasar Akuntansi*. Yogyakarta: BPSTIE YKPN.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. [http: www.governance-indonesia.or.id](http://www.governance-indonesia.or.id). Diunduh pada tanggal 17 Juli 2010.
- Mulyadi. 2002. *Auditing: Jilid 1 Edisi Enam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Bank Indonesia. 2006. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum. <http://www.bi.go.id>, diunduh pada 5 April 2011.
- Handayani, dkk. 2016 "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dan Efeknya Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014)". Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2010. "Analisis Kritis atas Laporan Keuangan". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hardikasari, E. 2011. "Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2006-2008". Semarang: Universitas Diponegoro.